BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan media yang digunakan oleh pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya untuk dapat mengetahui kinerja perusahaan. Hasil kinerja perusahaan atau laporan yang disediakan perusahaan saat ini bukan hanya dapat dilihat melalui informasi keuangan semata, namun juga dari informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu salah satunya dari pengungkapan laporan tahunan perusahaan.

Pengungkapan menurut Chow dan Wong-Boren; Healy dan Palepu dalam Khomsiyah (2003) merupakan salah satu alat yang penting untuk dapat mengatasi masalah keagenan antara manajemen dan pemilik, karena dipandang sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi. Pernyataan tersebut dikemukakan karena pada dasarnya informasi yang disajikan oleh perusahaan baik dalam laporan keuangan maupun laporan tahunan digunakan pihak yang berkepentingan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan, seperti yang dinyatakan dalam Yadiati (2007 : 52), di mana pelaporan keuangan (*financial reporting*) adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup.

Oleh karena itu pengungkapan atau pelaporan informasi keuangan merupakan media penting yang digunakan dalam upaya untuk menyampaikan hasil kinerja perusahaan, karena dengan adanya pelaporan dan pengungkapan informasi keuangan perusahaan, maka para pemegang saham serta pihak yang berkepentingan memiliki gambaran yang baik mengenai kinerja serta perkembangan perusahaan dalam suatu kurun waktu tertentu. Dengan adanya pengungkapan informasi keuangan yang disajikan pihak manajemen, maka hal tersebut akan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen dengan para pemegang saham.

Seperti pernyataan hasil penelitian Healy dan Palepu; serta Welker yang dikutip oleh Khomsiyah (2003) yang mengatakan *corporate governance* merupakan upaya untuk melindungi investor dari adanya informasi asimetri yang dapat dilihat dari tingkat pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan. Sembiring dalam Nurkhayati dan Probohudono (2013) juga mengatakan bahwa adanya informasi yang lengkap, akurat serta tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

Jika pengungkapan informasi keuangan di Indonesia bertambah baik maka akan meningkatkan minat para calon investor untuk dapat menginvestasikan dananya serta juga dapat menarik perhatian masyarakat kalangan menengah untuk dapat terjun ke dunia bisnis dan menginvestasikan dananya dalam pasar modal, sehingga hal tersebut tidak hanya menguntungkan para calon investor, namun juga perusahaan yang memerlukan dana dari pihak eksternal dalam menjalankan

kegiatan bisnisnya serta akan dapat memperbaiki perekonomian Indonesia secara lebih luas.

Namun PricewaterhouseCoopers dalam Khomsiyah (2003) yang melakukan penelitian pada tahun 1999 mengenai adanya *information gap* antara *agent* dengan *principal*, dengan menggunakan responden investor institusional di Singapura mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa diantara negara-negara di Asia dan Australia, Indonesia berada pada urutan yang sangat rendah dalam persepsian standar akuntabilitas, proses penentuan dewan, auditing dan ketaatannya. Berdasarkan penelitian tersebut, Indonesia juga berada pada urutan yang sangat rendah untuk bidang pengungkapan dan transparansi.

Kemudian pada tahun 2002 PricewaterhouseCoopers kembali melakukan survey yang dilakukan dengan menggunakan responden investor institusional di Jakarta. Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Di mana Indonesia masih berada di urutan yang rendah dalam persepsian standar akuntabilitas, auditing dan ketaatannya, dan pengungkapan dan transparansi, walaupun ada peningkatan untuk persepsian standar proses penentuan dewan, tetapi masih di bawah Malaysia.

Penelitian Ho dan Wong dalam Khomsiyah (2003) yang dilakukan pada tahun 2000 menunjukkan bahwa Indonesia, Thailand, dan Jepang yang mempunyai tingkat transparansi yang rendah karena merupakan negara yang mengalami *volatile shocks* yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang mempunyai transparansi yang lebih tinggi (Hongkong, Singapura, dan Taiwan).

Fakta tersebut merupakan catatan buruk yang dimiliki dunia bisnis Indonesia karena informasi yang disediakan perusahaan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan investasi para investor belum dapat sepenuhnya dipercaya. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dalam pelaporan keuangan yang sebenarnya, di mana International Financial Reporting Standards mengatakan “*objective of financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions about providing resources to the entity*”. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya informasi yang disediakan oleh perusahaan yang dapat digunakan dan dipercaya oleh pihak yang berkepentingan khususnya pemegang saham, sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa mendatang.

Para pemegang saham dan pihak berkepentingan yang lain dalam melihat atau menilai hasil kinerja perusahaan tidak terbatas hanya melihat pada laporan keuangan semata, namun juga melihat dari pengungkapan informasi non keuangan dalam berbagai bidang lain yang memiliki kemampuan untuk mendukung kinerja perusahaan, seperti dari segi kinerja *top management*, pelaporan segmen, nilai wajar aktiva dan kewajiban keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bidang lain yang dipandang penting oleh investor, analisis keuangan, maupun masyarakat dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan demi kelangsungan hidup perusahaan. Dengan adanya pengungkapan yang transparan, maka hal ini akan dapat meningkatkan

kepercayaan yang lebih dari pemegang saham serta calon investor dalam melihat hasil pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola perusahaan.

Pengungkapan yang disediakan oleh perusahaan akan membantu para pihak yang berkepentingan untuk dapat memahami hasil kinerja perusahaan selama kurun waktu tertentu. Sumber informasi mengenai kinerja dan prospek perusahaan yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan investasi bagi pemegang saham salah satunya adalah laporan tahunan.

Dalam laporan tahunan, pengungkapan dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Menurut Nugroho (2011) pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku mengenai pengungkapan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bapepam, sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilaporkan perusahaan di luar pengungkapan yang sudah diwajibkan oleh standar akuntansi. Pengungkapan sukarela tersebut merupakan pengungkapan yang berisi informasi yang disediakan manajemen dengan adanya pertimbangan kebijakan tertentu untuk menyampaikan informasi yang relevan terkait dengan kegiatan operasional perusahaan baik berupa informasi keuangan maupun non keuangan.

Dalam upaya untuk dapat mengungkapkan informasi yang lebih transparan tersebut, maka perlu diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Luasnya pengungkapan informasi yang disediakan perusahaan berbeda-beda, di mana perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait dengan kondisi yang melekat pada perusahaan (Rusiti dan Kurniawan,

2013). Rusiti dan Kurniawan (2013) menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela yaitu faktor *corporate governance* dan karakteristik perusahaan. Di mana beberapa variabel yang dijadikan proksi dalam menghitung *corporate governance* adalah proporsi komisaris independen, ukuran direksi dan ukuran komisaris. Faktor struktur kepemilikan perusahaan diproksikan dengan kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik. Faktor karakteristik perusahaan diproksikan dengan profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan, tipe auditor, dan basis perusahaan.

Corporate governance merupakan upaya untuk melindungi investor dari adanya informasi asimetri yang dapat dilihat dari tingkat pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan (Healy dan Palepu; dan Welker dalam Khomsiyah (2003). Khomsiyah (2003) juga memberikan bukti dalam penelitian yang dilakukannya yaitu perusahaan-perusahaan yang melaksanakan *corporate governance* akan memberikan lebih banyak informasi, dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan, semakin baik pelaksanaan *Corporate Governance* oleh suatu perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkap.

Prasetyo dalam Nugroho dan Haddiprajitno (2014) mengutip pernyataan yang dilakukan oleh Conor yang menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring. Oleh karena itu maka salah satu jalan yang dilakukan investor dalam meninjau bahwa modalnya telah diinvestasikan secara tepat ialah dengan melakukan sebuah proses pengawasan atau monitoring. Di mana proses pengawasan tersebut dilakukan oleh dewan komisaris yang merupakan salah

satu bagian dalam *corporate governance*. Dengan adanya proses monitoring ini investor dapat memonitor kinerja manajemen dalam mengelola modalnya. Dengan adanya monitoring ini juga bertujuan mengurangi asimetri informasi, banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan mendisiplinkan manajemen untuk menghasilkan nilai informasi yang relevan untuk mengurangi asimetri informasi.

Namun Herwidayatmo (2000) dalam Khomsiyah (2003), mengutip penelitian yang dilakukan *Asian Development Bank* pada tahun 1999 yang hasilnya menunjukkan bahwa salah satu penyebab krisis yang terjadi di beberapa negara Asia (Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand, dan Korea) adalah akibat tidak diterapkannya *Good Corporate Governance*, yaitu struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, mekanisme pengawasan oleh dewan komisaris yang tidak berfungsi secara efektif, tidak adanya kontrol pasar terhadap perusahaan, dominasi pendanaan eksternal yang berasal dari pinjaman bank, dan lemahnya pengawasan.

Nuryaman (2009) juga mengatakan di sepanjang tahun 2004 sampai dengan Maret 2005, Bapepam dan LK mencatat ada 44 kasus pelanggaran pasar modal, 42% di antaranya adalah perusahaan manufaktur, di mana dari 44 kasus pasar modal tersebut terdapat 26 kasus (60 %) menyangkut benturan kepentingan, keterbukaan informasi dan penyajian laporan keuangan (Bapepam dan LK 2005) dan benturan kepentingan dan tidak diungkapkannya informasi penting akan menyebabkan kerugian bagi pihak investor eksternal.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia belum berjalan dengan baik dan efektif, di mana salah satu penyebabnya dikarenakan terdapat kelemahan pengawasan oleh

dewan komisaris sebagai salah satu pondasi dari terciptanya *good corporate governance*. Oleh karena itu, dalam upaya untuk dapat meraih kepercayaan melalui pengungkapan informasi kinerja perusahaan kepada para pemegang saham dan para pihak yang berkepentingan lainnya, maka diperlukan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Salah satu peran top manajemen yaitu dewan komisaris dibutuhkan dalam upaya perwujudan *good corporate governance* agar dapat mengawasi hasil kinerja perusahaan serta meningkatkan transparansi pelaporan informasi keuangan perusahaan. Peran dewan komisaris dalam pengawasan kinerja direksi dapat meningkatkan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan dengan adanya pengungkapan informasi yang diberikan perusahaan. Namun Usahawan dalam Andriani, dkk (2007), menyatakan bahwa terkadang jabatan dewan komisaris diberikan kepada anggota keluarga atau orang-orang kepercayaan sebagai jabatan kehormatan atau penghargaan yang mensyaratkan adanya loyalitas yang akan mendapatkan imbal balik dan jabatan komisaris juga diberikan kepada pejabat atau mantan pejabat pemerintah yang masih mempunyai pengaruh sebagai upaya untuk meningkatkan *bargaining power* perusahaan dikalangan pemerintah. Hal ini akan mengurangi tingkat kredibilitas dewan komisaris dalam menjalankan perannya.

Surya dan Yustiavandana dalam Yuniasih, dkk(2011) mengatakan bahwa salah satu mekanisme dari *corporate governance* adalah struktur atau komposisi dewan komisaris dan direksi sebagai organ perusahaan yang menjamin penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* dan meningkatkan perlindungan bagi kreditur.

Menurut Milliken dan Martin dalam Yuniasih, dkk (2011) mengatakan diversitas dewan komisaris dan direksi dibedakan antara diversitas demografi (bisa diamati) seperti: gender, umur, ras, dan kebangsaan, serta diversitas kognitif (tidak bisa diamati) seperti: keahlian (*skill*) dan pengalaman.

Luckerath-Rovers dalam Yuniasih, dkk (2011) menjelaskan dua alasan mengapa komposisi dewan komisaris dan direksi yang berkaitan dengan diversitas anggota dewan bisa memengaruhi nilai perusahaan. Alasan pertama adalah karena dewan komisaris dan direksi memiliki pengaruh paling besar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Alasan kedua adalah bahwa dewan komisaris dan direksi juga memiliki peranan sebagai pengawas (*supervisory role*) yakni mewakili kepentingan pemegang saham, harus merespon secara tepat tantangan atau kemungkinan *takeover*, dan memonitor nilai total perusahaan.

Yuniasih, dkk (2011) menguji mengenai diversitas gender anggota dewan dan mendapatkan hasil yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Robins dan Judge dalam Yuniasih, dkk (2011) menyatakan bahwa wanita pada umumnya lebih memiliki pemikiran yang mendetail terkait dalam analisis pengambilan keputusan, di mana mereka cenderung menganalisis masalah-masalah sebelum membuat keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat, sehingga mengasikkan pertimbangan masalah serta alternative penyelesaian yang lebih seksama. Namun Sudiartana (2013) mendapatkan hasil yang berbeda, yang mengatakan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan masih tergolong kecil (minoritas) sehingga tidak memiliki hak suara mayoritas dalam menentukan keputusan yang dibuat dewan terkait dengan luas pengungkapan sukarela.

Dalam menguji keberadaan anggota dewan berkebangsaan asing, Yuniasih, dkk (2011) mendapatkan hasil yang berpengaruh positif. Di mana keberadaan mereka dinilai membawa opini, perspektif, bahasa, keyakinan, latar belakang keluarga, dan pengalaman profesional yang beragam, sehingga memperkaya pengetahuan bisnis dan alternative penyelesaian masalah yang bersifat kompleks. Keberadaan asing dalam dewan dapat memicu keterbukaan informasi dengan harapan kredibilitas perusahaan akan meningkat. Keterbukaan tersebut ditunjukkan dengan melakukan pengungkapan yang lebih luas.

Otoritas Jasa Keuangan (2014) juga mengatakan dalam Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia bahwa komposisi dewan komisaris dan direksi yang beragam akan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif dikarenakan keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai sudut pandang dan kepentingan. Keberagaman komposisi dewan komisaris dan direksi antara lain mencakup kualifikasi akademik, keahlian, usia, dan gender. Secara individual anggota dewan komisaris dan direksi dengan latar belakang yang mungkin berbeda-beda akan menyediakan sumber daya penting bagi perusahaan (Siciliano, 1996 dalam Yuniasih, dkk2011).

Diversitas dewan juga dapat diukur melalui latar belakang pendidikan, di mana Sudiartana (2013) mendapatkan hasil yang berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela. Pernyataan yang diberikan Sudiartana (2013) yaitu seorang anggota dewan perusahaan harus memiliki kredibilitas dan *skill* serta pengalaman yang diperlukan, sehingga mampu memberikan *judgement* independen dalam isu yang berkaitan dengan strategi, kinerja, dan sumber daya perusahaan. Pemilihan anggota dewan perusahaan harus berpedoman pada persyaratan mengenai

pencapaian pendidikan, kecukupan kompetensi, persyaratan umur, integritas atau kejujuran, dan ketekunan seseorang.

Keragaman latar belakang pendidikan anggota dewan mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan pengungkapan informasi kepada publik. Semakin beragam latar belakang pendidikan dewan, semakin luas pengungkapan sukarela yang dilakukan. Keberadaan anggota dewan memberikan perspektif mengenai risiko signifikan dan keuntungan kompetitif, serta lebih memahami mengenai tantangan yang akan dihadapi dalam bisnis perusahaan (Ponnu dalam Sudiartana, 2013). Namun Yuniasih, dkk (2011) mendapatkan hasil yang berbeda, yang mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya diperoleh melalui jalur formal namun juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki. Selain itu, pelatihan dan kursus juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengungkapkan suatu informasi.

Oleh karena itu, dalam upaya untuk dapat meningkatkan kredibilitas dewan komisaris maka salah satunya diperlukan adanya keahlian (*skill*) yang dimiliki dewan komisaris dalam upaya meningkatkan penyajian informasi perusahaan yang relevan. Dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan formal dapat mempengaruhi perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan pengungkapan informasi serta nilai perusahaan kepada para pihak yang berkepentingan. Menurut Kusumastuti, Supatmi, dan Sastra (2007) latar belakang pendidikan formal anggota dewan komisaris dan direksi merupakan karakteristik kognitif yang dapat mempengaruhi kemampuan dewan dalam pengambilan keputusan bisnis serta mengelola bisnis. OJK (2014) juga berpendapat bahwa adanya globalisasi usaha meningkatkan harapan investor dan menuntut keahlian dari dewan komisaris dan

direksi perusahaan yang semakin tinggi dan kompleks untuk dapat memenuhi harapan tersebut.

Faktor lain yang dapat memengaruhi luas pengungkapan sukarela yaitu struktur kepemilikan. Aniroh (2014) mendapatkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Alasan yang didapat dalam hasil tersebut karena apabila suatu perusahaan memiliki persentase kepemilikan saham oleh pemerintah yang tinggi, maka keberadaan perusahaan tersebut akan lebih disorot oleh *stakeholder*-nya termasuk pemerintah. Perhatian dan tekanan pemerintah yang besar membuat perusahaan harus lebih transparan dalam pengelolaannya. Hasil tersebut juga sesuai dengan hasil yang didapat Nurkhayati, dkk (2013).

Pengujian mengenai kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela, Rusiti, dkk (2013), Nurkhayati, dkk (2013), dan Aniroh (2014) mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Penjelasan yang dikemukakan Rusiti, dkk (2013) untuk hasil tersebut yaitu terdapat kecenderungan manajemen hanya tertarik dengan peningkatan nilai saham dan tidak memiliki tendensi apapun atas kedudukannya sebagai pemilik perusahaan termasuk dalam memengaruhi pengungkapan sukarela.

Sedangkan untuk pengujian kepemilikan publik terhadap pengungkapan sukarela, Rusiti, dkk (2013) mendapatkan hasil yang tidak berpengaruh, hal tersebut dikarenakan adanya peraturan pengungkapan wajib yang semakin luas dan kecenderungan perusahaan untuk menyampaikan informasi sebatas dari apa yang diwajibkan, membuat kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Wardani (2012) juga memiliki hasil penelitian yang serupa yang mengatakan

bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan publik terhadap pengungkapan sukarela.

Faktor lain yang dapat memengaruhi pengungkapan sukarela yaitu karakteristik perusahaan, di mana Marwata dalam Nugroho (2011) mengatakan pengetahuan tentang hubungan antara karakteristik perusahaan dan keluasan pengungkapan laporan keuangan akan berguna dalam analisis laporan keuangan, yaitu memberi gambaran tentang tipe dan jumlah informasi yang disediakan perusahaan dengan karakteristik tertentu. Dalam mengungkapkan informasi keuangan, perusahaan akan menghadapi banyak pertimbangan mengenai seberapa banyak informasi yang akan diungkapkan kepada publik. Luasnya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan bergantung pada hasil kinerjanya. Di mana, jika perusahaan mengalami penurunan kinerja maka manajemen akan sulit untuk dapat mengungkapkan informasi kepada para pemegang saham. Hal tersebut dikarenakan manajemen tidak ingin jika para pemegang saham akan meninggalkan perusahaan dan tidak lagi menginvestasikan dananya, yang berakibat pada kebangkrutan dan terancamnya kelangsungan perusahaan.

Namun jika hal yang sebaliknya yang terjadi yaitu di mana perusahaan mengalami peningkatan kinerja yang terlihat pada laba, maka manajemen akan secara sukarela mengungkapkan informasi keuangan, karena hal tersebut dapat menarik perhatian para investor terutama mengenai informasi positif pada perusahaan. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2012) serta Efrata dan Sherlita (2012) yang mendapatkan pengaruh positif antara profitabilitas terhadap pengungkapan sukarela. Pernyataan Wild, Shaw, Chiappetta dalam Wardani (2012) mengenai hasil tersebut adalah karena profitabilitas berhubungan

dengan kemampuan suatu perusahaan untuk menyediakan *reward* keuangan yang cukup untuk memberikan daya tarik dan menjaga pendanaan perusahaan, sehingga semakin tinggi profitabilitas maka kelangsungan usaha perusahaan juga semakin terjaga.

Informasi mengenai profitabilitas perusahaan ini diperlukan oleh *stakeholder* untuk mengawasi kinerja manajemen yang diungkapkan oleh perusahaan melalui laporan tahunannya dalam rangka untuk menganalisis kelangsungan usaha perusahaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa informasi yang diungkapkan didasarkan pada manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan dengan adanya pengungkapan informasi tersebut.

Adanya pengungkapan informasi yang lebih transparan juga perlu dilakukan agar perusahaan mendapatkan kepercayaan dari pihak lainnya seperti kreditor. Upaya tersebut perlu dilakukan agar perusahaan mendapatkan kepercayaan mengenai pinjaman dana dari pihak kreditor demi kelangsungan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Di mana untuk perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang lebih tinggi maka perusahaan tersebut cenderung lebih banyak dalam mengungkapkan informasi keuangannya agar dapat memperoleh kepercayaan dari pihak kreditor bahwa perusahaan memiliki hasil kinerja yang baik. Dengan adanya hasil kinerja yang baik, maka perusahaan dapat memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk dapat membayar pinjaman tersebut.

Dalam upaya untuk dapat memiliki kepercayaan pihak kreditor untuk mendapatkan tambahan pinjaman dana tersebut, maka dapat dikatakan bahwa rasio *leverage* dapat mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Hal ini sesuai dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Widiastuti dalam Wardani (2012) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara *leverage* dengan luas pengungkapan, di mana perusahaan yang memiliki hutang atau *leverage* yang tinggi perlu pengawasan yang tinggi pula karena biaya hutang tidak terlepas dari insentif bagi manajer sehingga perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan terhadap perusahaan dapat dilakukan melalui luasnya pengungkapan yang dipublikasikan.

Namun Mujiono dan Nani (2006) dan Wardani (2012) tidak mendapatkan hasil yang serupa. Wardani (2012) berpendapat bahwa semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin sedikit pengungkapan laporan tahunan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai alat pengawasan bagi manajemen dalam rangka menjaga kelangsungan usaha perusahaan, di mana manajemen hanya akan mengungkapkan informasi yang seperlunya saja dalam laporan tahunan jika perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi agar risiko pendanaan perusahaan terlihat rendah.

Dari adanya uraian di atas, dapat diketahui bahwa salah satu penyebab minimnya tingkat pengungkapan dan transparansi dalam pelaporan informasi keuangan salah satunya dikarenakan oleh adanya peran dewan komisaris yang belum berjalan dengan efektif, penerapan *corporate governance* di Indonesia masih rendah, serta minimnya rasa kebutuhan bagi perusahaan untuk dapat mengungkapkan informasi keuangan secara sukarela untuk dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang perlu diketahui oleh para stakeholder, di mana kualitas informasi yang diungkapkan oleh perusahaan kepada para pihak yang berkepentingan dan publik masih belum baik.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai latar belakang pendidikan dewan komisaris, *leverage* dan profitabilitas terhadap luas pengungkapan sukarela. Di mana ketiga variabel di atas menunjukkan hasil yang berbeda dan tidak konsisten, oleh karena itu peneliti tertarik mengadakan penelitian mengenai “PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DEWAN KOMISARIS, *LEVERAGE*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa permasalahan yang dapat identifikasi dalam penelitian ini, yaitu :

1. Indonesia berada pada urutan yang sangat rendah dalam persepsian standar akuntabilitas, proses penentuan dewan, auditing dan ketaatannya, juga untuk bidang pengungkapan dan transparansi, diantara negara-negara di Asia dan Australia.
2. Salah satu penyebab krisis yang terjadi di Indonesia adalah akibat tidak diterapkannya *Good Corporate Governance*, yaitu struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, mekanisme pengawasan oleh dewan komisaris yang tidak berfungsi secara efektif, tidak adanya kontrol pasar terhadap perusahaan, dominasi pendanaan eksternal yang berasal dari pinjaman bank, dan lemahnya pengawasan.
3. Di sepanjang tahun 2004 sampai dengan Maret 2005, Bapepam dan LK mencatat ada 44 kasus pelanggaran pasar modal, 42% di antaranya adalah

perusahaan manufaktur, di mana dari 44 kasus pasar modal tersebut terdapat 26 kasus (60 %) menyangkut benturan kepentingan, keterbukaan informasi dan penyajian laporan keuangan.

4. Terkadang jabatan dewan komisaris diberikan kepada anggota keluarga atau orang kepercayaan sebagai jabatan kehormatan atau penghargaan dan jabatan komisaris juga diberikan kepada pejabat atau mantan pejabat pemerintah yang masih mempunyai pengaruh.
5. Seorang anggota dewan perusahaan harus memiliki kredibilitas dan *skill* serta pengalaman yang diperlukan, sehingga mampu memberikan *judgement* independen dalam isu yang berkaitan dengan strategi, kinerja, dan sumber daya perusahaan. Keberadaan anggota dewan memberikan perspektif mengenai risiko signifikan dan keuntungan kompetitif, serta lebih memahami mengenai tantangan yang akan dihadapi dalam bisnis perusahaan.
6. Adanya globalisasi usaha meningkatkan harapan investor dan menuntut keahlian dari dewan komisaris dan direksi perusahaan yang semakin tinggi dan kompleks untuk dapat memenuhi harapan tersebut.
7. Apabila suatu perusahaan memiliki persentase kepemilikan saham oleh pemerintah yang tinggi, maka keberadaan perusahaan tersebut akan lebih disorot oleh *stakeholder*-nya termasuk pemerintah. Perhatian dan tekanan pemerintah yang besar membuat perusahaan harus lebih transparan dalam pengelolaannya.

8. Terdapat kecenderungan manajemen hanya tertarik dengan peningkatan nilai saham dan tidak memiliki tendensi apapun atas kedudukannya sebagai pemilik perusahaan termasuk dalam memengaruhi pengungkapan sukarela.
9. Adanya peraturan pengungkapan wajib yang semakin luas dan kecenderungan perusahaan untuk menyampaikan informasi sebatas dari apa yang diwajibkan.
10. Profitabilitas berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk menyediakan *reward* keuangan yang cukup untuk memberikan daya tarik dan menjaga pendanaan perusahaan.
11. Perusahaan yang memiliki hutang atau *leverage* yang tinggi perlu pengawasan yang tinggi pula karena biaya hutang tidak terlepas dari insentif bagi manajer.

C. Pembatasan Masalah

Keterbatasan peneliti dalam upaya pemecahan masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada masalah pengaruh latar belakang pendidikan dewan komisaris, *leverage*, dan profitabilitas terhadap luas pengungkapan sukarela.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh dari latar belakang pendidikan dewan komisaris terhadap luas pengungkapan sukarela?
2. Apakah terdapat pengaruh dari *leverage* terhadap luas pengungkapan sukarela?
3. Apakah terdapat pengaruh dari profitabilitas terhadap luas pengungkapan sukarela?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Sebagai sarana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam bidang akuntansi keuangan, terutama mengenai pengungkapan sukarela.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan atau referensi untuk dapat melakukan penelitian serupa serta untuk dapat menambahkan pembelajaran bidang akuntansi keuangan terutama mengenai luas pengungkapan sukarela.
2. Kegunaan Praktik
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada manajemen perusahaan untuk dapat meningkatkan pengungkapan informasi keuangan agar dapat mendapatkan meningkatkan transparansi pada laporan keuangan serta dapat menambahkan tingkat kepercayaan para investor.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu para calon investor agar dapat lebih bijak memilih perusahaan yang mau untuk mengungkapkan laporan keuangan secara transparan dan perusahaan yang dapat dipercayakan dalam mengolah dana yang diinvestasikan untuk dapat memperoleh keuntungan.